

Analisis Wacana “Sinicization of Islam” Pemerintah China Terhadap Muslim Uyghur: Kritik Barat dan Pandangan Islam

Analysis of the Chinese Government's "Sinicization of Islam" Discourse Against Uyghur Muslims: Western Criticism and Islamic Views

Salma Regina* & Ali Maksum

Hubungan Internasional Program Magister, Fakultas Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 31 Desember 2025; Direview: 07 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

*Corresponding Email: salmaregina20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wacana kebijakan yang diberlakukan oleh Xi Jinping terkait konsep "Sinicization of Islam" hingga kritik Barat serta pandangan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China di bawah pimpinan Xi Jinping telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan praktik keagamaan dengan nilai-nilai sosialisme dan budaya China. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama bagi komunitas Muslim Uyghur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan metode pengolahan data yang dilakukan yaitu melakukan analisis wacana secara deskriptif dengan mengkaji dokumen yang relevan. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sekunder, termasuk analisis literatur, dan laporan media. Kajian ini menemukan bahwa wacana *Sinicization of Islam* yang diusung Pemerintah China mendapat kritik dari negara barat serta bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dalam perspektif Islam. Simpulan dari penelitian ini menekankan bahwa kebijakan *Sinicization* dapat dipahami sebagai bentuk dominasi kultural dan politik yang menimbulkan ketegangan antara ideologi negara dan nilai-nilai universal kemanusiaan serta keislaman.

Kata Kunci: Analisis Wacana; *Sinicization of Islam*; Kritik Barat; Muslim Uyghur; Pandangan Islam

Abstract

This study aims to examine the discourse on policies implemented by Xi Jinping regarding the concept of "Sinicization of Islam" as well as Western criticism and Islamic perspectives. In recent years, the Chinese government under Xi Jinping has issued various policies to integrate religious practices with socialist values and Chinese culture. This has raised concerns about human rights violations and religious freedom for the Uyghur Muslim community. The type of research used is qualitative, while the data processing method used is descriptive discourse analysis by examining relevant documents. Data was obtained through secondary data collection techniques, including literature analysis and media reports. This study found that the discourse of Sinicization of Islam promoted by the Chinese government has been criticized by Western countries and is contrary to the principle of religious freedom in the Islamic perspective. The conclusion of this study emphasizes that the Sinicization policy can be understood as a form of cultural and political domination that causes tension between state ideology and universal values of humanity and Islam.

Keywords: Discourse Analysis; *Sinicization of Islam*; Western Criticism; Uyghur Muslims; Islamic Perspectives

How to Cite: Regina, S., & Maksum, A. (2026). Analisis Wacana “Sinicization of Islam” Pemerintah China Terhadap Muslim Uyghur: Kritik Barat dan Pandangan Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (3): 1327-1335.



PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah mengintensifkan upayanya untuk mengintegrasikan semua kelompok etnis dan agama ke dalam kerangka nilai-nilai sosialisme yang dicita-citakan oleh Partai Komunis China. Salah satu kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini adalah Muslim Uyghur di wilayah otonom Xinjiang. Dalam konteks ini, istilah "Sinicization of Islam" atau "Islam Berorientasi China" muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan budaya dan ideologi negara. Kebijakan "sinicization" ini bertujuan untuk memutus hubungan antara komunitas agama lokal dengan jaringan global mereka, membuat mereka tunduk pada Partai Komunis dan mengurangi pengaruh politik mereka, di mana pihak berwenang berusaha mengontrol ekspresi keagamaan dan mempromosikan versi Islam yang sesuai dengan kepentingan negara. (Sehrawat, 2024)

Perbedaan cara pandang antara pemerintah China, Barat, dan Islam menunjukkan bahwa isu *Sinicization of Islam* merupakan arena pertarungan wacana yang kompleks. Setiap aktor memproduksi wacana berdasarkan ideologi, kepentingan, dan kerangka pengetahuan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kritis yang mampu membongkar bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk membangun legitimasi, menormalisasi kekuasaan, serta membentuk persepsi publik. Dalam konteks inilah, Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk menjadi relevan sebagai pendekatan metodologis. Model van Dijk memungkinkan peneliti untuk menganalisis wacana pada tiga level utama, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, sehingga tidak hanya mengkaji struktur bahasa, tetapi juga ideologi, pengetahuan, dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya. Dengan menggunakan AWK van Dijk, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kebijakan *Sinicization of Islam* dikonstruksikan secara diskursif oleh pemerintah China, bagaimana kebijakan tersebut dikritisi dalam wacana Barat, serta bagaimana Islam memandangnya dari perspektif normatif dan etis. (Van Dijk, 2015)

Berbicara terkait dinamika agama dan politik yang terjadi di China, ada beberapa penulis yang telah terlebih dahulu memberikan argumennya. Tulisan "Religion and Politics in China" karya Hsin-Chi Kuan mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan politik di Tiongkok sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Penulis menyoroti ruang untuk otonomi agama telah berkembang seiring waktu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan internasional. Penulis menyimpulkan dengan menyajikan empat skenario masa depan berdasarkan varian kebijakan agama dan perkembangan sosial. Pertama *victim model, revolutionary model, philanthropist model, teacher model*. (Kuan, 2012)

Tidak berhenti pada tulisan Hsin-Chi Kuan, tulisan lainnya yang berjudul "Religion in China's Public Diplomacy" karya Wang Liwan memberikan analisis mendalam terkait bagaimana agama digunakan sebagai sebuah alat strategis dalam diplomasi publik Tiongkok. Secara keseluruhan, tulisan Wang Liwan memberikan pandangan mendalam tentang kompleksitas peran agama dalam diplomasi publik Tiongkok. Ia menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah Tiongkok untuk menggunakan agama sebagai alat diplomasi, tantangan domestik dan kritik internasional tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Tiongkok terus berusaha untuk menyeimbangkan antara mempromosikan citra positif di luar negeri dan mengelola isu-isu agama di dalam negeri, dengan harapan dapat membangun reputasi sebagai negara yang menghargai kebebasan beragama dan kerukunan sosial di mata dunia. (Liwana, 2020)

Kompleksitas hubungan agama dan politik di Tiongkok dijelaskan kembali secara rinci melalui karya Grant S. Gilreath tentang "Pemerintah dan Agama di Tiongkok". Tulisan tersebut menjelajahi hubungan rumit antara pemerintah Tiongkok dan praktik keagamaan. Tulisan tersebut dimulai dengan memberikan sejarah singkat tentang agama di Tiongkok, menyoroti keberadaan lama berbagai tradisi keagamaan seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Karya Grant S. Gilreath memberikan analisis komprehensif tentang hubungan multifaset antara negara Tiongkok dan praktik keagamaan. Karya tersebut menegaskan pentingnya memahami dinamika ini untuk memahami perkembangan politik dan sosial yang lebih luas di Tiongkok kontemporer. (Gilreath, 2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, ideologi, dan relasi kekuasaan yang terkandung dalam wacana Sinicization of Islam oleh Pemerintah China terhadap Muslim Uyghur. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual melalui analisis teks dan narasi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan sekaligus menginterpretasikan bagaimana wacana tersebut dibangun, disebarkan, dan dipertentangkan dalam ruang sosial dan politik (Basri, 2014).

Model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang selalu berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan ideologi. Dalam kerangka van Dijk, bahasa tidak dipahami sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai medium yang digunakan oleh aktor-aktor dominan untuk membentuk realitas sosial dan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, konsep kekuasaan dan dominasi dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui analisis terhadap bagaimana negara, sebagai aktor yang memiliki otoritas politik, merepresentasikan Islam dan Muslim Uyghur dalam teks-teks kebijakan, pernyataan resmi, serta narasi media (Van Dijk, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder meliputi dokumen kebijakan dan pernyataan resmi Pemerintah China terkait Sinicization of Islam, artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang membahas isu Muslim Uyghur dan kebijakan negara terhadap agama, serta media berita internasional yang merepresentasikan kritik Barat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber akademik dan keislaman yang merepresentasikan pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap umat. Data sekunder tersebut dipilih karena mengandung wacana yang relevan dan merepresentasikan posisi ideologis aktor-aktor yang terlibat dalam isu ini. Data sekunder selanjutnya digunakan sebagai data untuk membantu analisis data. Metode pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan analisis secara deskriptif dan dinarasikan dengan jelas (Stone and Sidel, 2003).

Tiga unsur utama Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, peneliti menganalisis struktur bahasa untuk mengungkap bagaimana kekuasaan dan ideologi direpresentasikan secara linguistik. Analisis dilakukan melalui identifikasi struktur makro untuk menemukan tema dominan teks, superstruktur untuk melihat pola argumentasi dan legitimasi kebijakan, serta struktur mikro untuk menelaah pilihan kata, istilah, dan konstruksi kalimat yang digunakan dalam merepresentasikan Islam, Muslim Uyghur, dan negara. Melalui analisis ini, bahasa dipahami sebagai sarana utama dalam mereproduksi dominasi negara dan memarginalkan kelompok minoritas (Van Dijk, 2015).

Selanjutnya, analisis kognisi sosial digunakan untuk menelusuri sistem pengetahuan, keyakinan, dan ideologi yang mendasari produksi wacana oleh aktor-aktor terkait. Dalam konteks ini, kognisi sosial Pemerintah China dianalisis sebagai kerangka berpikir yang menempatkan agama dalam posisi subordinat terhadap ideologi negara dan stabilitas nasional. Sementara itu, kognisi sosial Barat dipahami melalui kerangka liberalisme dan hak asasi manusia yang membentuk kritik terhadap kebijakan China. Di sisi lain, kognisi sosial Islam dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan solidaritas keumatan. Analisis kognisi sosial ini berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan ideologis di balik produksi wacana.

Tahap selanjutnya adalah analisis konteks sosial, yang mengaitkan wacana Sinicization of Islam dengan kondisi sosial, politik, dan historis yang melatarbelakanginya. Analisis ini mencakup posisi Pemerintah China sebagai aktor dominan dengan kekuasaan struktural, situasi geopolitik global yang memengaruhi kritik Barat terhadap China, serta kondisi Muslim Uyghur sebagai kelompok minoritas yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Melalui analisis konteks sosial, wacana dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, bukan sebagai fenomena linguistik yang berdiri sendiri.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-naratif dan interpretatif, dengan menekankan keterkaitan antara struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Penyajian data



dilakukan dengan menjelaskan secara sistematis bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ideologi bekerja dalam wacana Sinicization of Islam Pemerintah China terhadap Muslim Uyghur, serta bagaimana wacana tersebut dikritisi oleh Barat dan dimaknai dalam pandangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Xi Jinping mengambil alih posisi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2012, telah terjadi perubahan signifikan dalam lanskap politik dan sosial negara tersebut. Xi, dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat, memulai serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memperkuat cengkeraman Partai Komunis atas berbagai aspek kehidupan di Tiongkok. Salah satu inisiatif utama yang ia luncurkan adalah konsep "Sinicization" yang menjadi landasan bagi upaya-upaya transformatif di seluruh negeri (L. Yuan, 2017).

"Sinicization" bukan hanya sebuah kebijakan yang diterapkan secara pasif, melainkan sebuah gerakan proaktif yang bertujuan untuk membentuk kembali identitas nasional Tiongkok (Theaker, 2024).

Kebijakan sinisasi di Tiongkok telah mengubah berbagai ekspresi budaya, dipandang sebagian sebagai cara memperkuat identitas nasional, namun juga dikhawatirkan membatasi kebebasan dan keragaman budaya. Di luar negeri, kebijakan ini menuai kritik sebagai bentuk nasionalisme berlebihan dan kontrol sosial, terutama terkait kebebasan beragama (Miao, 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, sinicization dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Tiongkok untuk mendefinisikan ulang posisinya di dunia. Di era di mana inovasi dan kreativitas menjadi kunci kesuksesan ekonomi, ada kekhawatiran bahwa pendekatan yang terlalu kaku dalam sinicization dapat menghambat daya saing Tiongkok dalam jangka Panjang (L. Yuan, 2017).

Wacana menurut Teun Van Dijk memiliki tiga aspek atau elemen fundamental: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pokok bahasan dalam analisis yang dilakukan oleh Teun Van Dijk adalah mengintegrasikan ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan dalam analisis. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, dimensi teks merupakan level analisis pertama yang berfokus pada bagaimana realitas sosial direpresentasikan melalui bahasa. Bahasa tidak dipahami sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai medium ideologis yang membangun, mempertahankan, dan menormalisasi relasi kuasa. Dalam penelitian ini, dimensi teks digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana Sinicization of Islam dikonstruksikan oleh pemerintah China, serta bagaimana wacana tersebut direpresentasikan, diperdebatkan, dan dikritisi melalui perspektif Barat dan Islam. Dimensi teks ini mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

1. Dimensi Teks

a. Struktur Makro

Struktur makro merujuk pada tema utama atau makna global yang membingkai keseluruhan teks penelitian (Van Dijk, 2015). Dalam penelitian ini, struktur makro berpusat pada kritik terhadap kebijakan Sinicization of Islam sebagai bentuk kontrol ideologis negara terhadap identitas keagamaan Muslim Uyghur, serta bagaimana kebijakan tersebut diposisikan secara berbeda dalam wacana Barat dan Islam. Tema besar yang dibangun bukan sekadar kebijakan asimilasi budaya, melainkan praktik hegemonik negara yang berpotensi mengekang kebebasan beragama dan menghapus identitas religius-etnis Muslim Uyghur. Dengan menjadikan *Sinicization of Islam* sebagai fokus utama, penelitian ini menempatkan kebijakan China dalam kerangka dominasi negara, marginalisasi minoritas, dan resistensi identitas keagamaan. Selain itu, struktur makro juga mencerminkan adanya pertarungan wacana global, di mana Barat memproduksi kritik berbasis HAM dan demokrasi liberal, sementara Islam menawarkan pandangan normatif yang berakar pada prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan solidaritas umat. Dengan demikian, struktur makro penelitian ini membangun narasi besar bahwa *Sinicization of Islam* bukan sekadar kebijakan internal China, melainkan fenomena diskursif global yang sarat dengan kepentingan ideologis dan politik.

b. Superstruktur

Superstruktur berkaitan dengan pola organisasi teks atau alur argumentasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, superstruktur mencerminkan upaya sistematis peneliti dalam menyusun argumen kritis secara logis dan bertahap. Secara umum, superstruktur

penelitian dapat dipahami sebagai berikut: penelitian diawali dengan pemaparan konseptual mengenai Sinicization of Islam sebagai kebijakan negara China, kemudian dilanjutkan dengan analisis dampaknya terhadap Muslim Uyghur, baik dalam aspek identitas, praktik keagamaan, maupun kehidupan sosial. Setelah itu, penelitian menguraikan wacana kritik Barat, yang umumnya bersumber dari laporan media internasional, lembaga HAM, dan diskursus politik global. Selanjutnya, penelitian menghadirkan pandangan Islam sebagai wacana alternatif yang bersifat normatif dan teologis, sebelum akhirnya menarik kesimpulan kritis. Skema ini menunjukkan bahwa penelitian tidak bersifat deskriptif linear, melainkan argumentatif dan komparatif, karena secara sadar mempertemukan dua kerangka wacana yang berbeda untuk membaca satu fenomena yang sama. Dalam perspektif van Dijk, superstruktur semacam ini mencerminkan strategi diskursif peneliti dalam menggiring pembaca pada kesimpulan tertentu, yakni bahwa kebijakan Sinicization perlu dipahami sebagai praktik kekuasaan yang problematis dari sudut pandang keadilan global dan nilai-nilai Islam.

c. Struktur Mikro

Struktur mikro menitikberatkan pada pilihan bahasa, istilah, metafora, dan strategi retorik yang digunakan dalam teks penelitian. Dalam penelitian ini, istilah "*Sinicization of Islam*" menjadi elemen linguistik sentral yang memuat muatan ideologis tinggi. Istilah ini tidak hanya merepresentasikan kebijakan negara, tetapi juga berfungsi sebagai label diskursif yang menandai relasi kuasa antara negara dan agama. Penggunaan frasa "Pemerintah China" secara konsisten menegaskan negara sebagai aktor dominan, sementara frasa "terhadap Muslim Uyghur" memosisikan kelompok ini sebagai objek kebijakan. Pilihan diksi ini memperkuat konstruksi relasi asimetris antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Selain itu, penggunaan istilah "kritik" dalam "Kritik Barat" mengandung makna evaluatif dan konfrontatif, yang menunjukkan adanya penolakan atau perlawanan wacana terhadap kebijakan China. Sebaliknya, istilah "pandangan" dalam "Pandangan Islam" bersifat lebih normatif dan reflektif, yang menekankan dimensi moral dan etis Islam. Secara keseluruhan, struktur mikro penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan secara strategis untuk membangun wacana kritis, mempertegas ketimpangan kekuasaan, dan menampilkan posisi ideologis tertentu (Van Dijk, 2015).

2. Kognisi Sosial

Dalam model van Dijk, kognisi sosial merujuk pada struktur mental kolektif, seperti pengetahuan, keyakinan, ideologi, dan nilai, yang memediasi hubungan antara teks dan konteks sosial. Dalam penelitian ini, kognisi sosial berperan penting dalam menjelaskan mengapa wacana tertentu diproduksi dan bagaimana ia dimaknai oleh aktor yang berbeda. (Van Dijk, 2015). Kognisi sosial pemerintah China dibangun atas dasar ideologi nasionalisme, stabilitas politik, dan supremasi negara. Dalam kerangka ini, agama dipandang sebagai entitas yang harus tunduk pada ideologi negara demi menjaga persatuan nasional. Sinicization of Islam, oleh karena itu, dipahami oleh negara sebagai proyek normalisasi dan integrasi, bukan sebagai penindasan. Sebaliknya, kognisi sosial Barat dibentuk oleh nilai-nilai liberalisme, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Kritik Barat terhadap kebijakan China lahir dari skema mental yang memandang negara seharusnya tidak mencampuri urusan keyakinan individu. Namun, dalam perspektif AWK, kognisi sosial Barat juga tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan geopolitik dan ideologi global. Sementara itu, kognisi sosial Islam berakar pada prinsip keadilan, perlindungan terhadap umat, dan kebebasan menjalankan ajaran agama. Pandangan Islam terhadap Sinicization of Islam memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak beragama dan martabat manusia. Kognisi ini diperkuat oleh solidaritas keumatan dan pengalaman historis umat Islam menghadapi dominasi politik. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya pertarungan kognisi sosial antara negara, Barat, dan Islam dalam memaknai isu Uyghur. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep "ekstremisme" beroperasi sebagai konstruksi diskursif yang elastis dan ideologis. Istilah ini tidak didefinisikan secara konseptual yang ketat, tetapi digunakan untuk mencakup berbagai ekspresi identitas keagamaan dan budaya Muslim Uyghur. Melalui konstruksi ini, negara tidak hanya mengkriminalisasi tindakan tertentu, tetapi juga mendeligitimasi identitas Islam sebagai potensi ancaman. Dalam kerangka kognisi sosial, wacana ini mencerminkan cara pandang negara yang memprioritaskan stabilitas politik di

atas pluralitas budaya dan kebebasan beragama, sehingga dominasi negara dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dan diperlukan.

3. Konteks Sosial

Konteks sosial dalam AWK van Dijk merujuk pada kondisi struktural, historis, dan politik yang melingkupi produksi wacana. (Van Dijk, 2015) Dalam konteks China, kebijakan Sinicization of Islam lahir dari sejarah panjang hubungan negara dengan agama, serta kekhawatiran terhadap separatisme dan ekstremisme di wilayah Xinjiang. Dalam konteks global, isu Muslim Uyghur menjadi bagian dari diskursus internasional tentang HAM, islamofobia, dan rivalitas geopolitik antara China dan Barat. Wacana yang berkembang tidak hanya mencerminkan kepedulian moral, tetapi juga pertarungan pengaruh politik dan ekonomi. Dalam konteks umat Islam global, isu Uyghur memunculkan wacana tentang krisis solidaritas, keadilan global, dan posisi umat Islam dalam tatanan dunia modern. Penelitian ini menempatkan pandangan Islam sebagai kritik normatif terhadap dominasi negara dan ketidakadilan struktural.

Pandangan Barat Terkait Sinicization

Berbeda dengan wacana negara China, wacana Barat membangun oposisi diskursif dengan menempatkan Muslim Uyghur sebagai korban pelanggaran HAM dan Pemerintah China sebagai aktor represif. Dalam teks media Barat dan laporan lembaga HAM, struktur makro didominasi oleh tema penindasan, kamp penahanan, dan pelanggaran kebebasan beragama. Namun, analisis wacana kritis menunjukkan bahwa kritik Barat juga tidak sepenuhnya netral. Pada tingkat kognisi sosial, wacana Barat dibentuk oleh ideologi liberalisme, universalitas HAM, dan narasi demokrasi. Selain itu, kritik tersebut sering beroperasi dalam kerangka geopolitik, di mana China diposisikan sebagai *the Other* yang otoriter dan tidak beradab. Dengan demikian, wacana Barat bukan hanya kritik moral, tetapi juga praktik diskursif yang mereproduksi superioritas nilai Barat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menolak kritik Barat, tetapi menempatkannya sebagai wacana yang memiliki kepentingan ideologis.

Sinicization mengacu pada proses di mana masyarakat non-Han Tiongkok berada di bawah pengaruh budaya Han Tiongkok, terutama dalam hal bahasa, norma sosial, budaya, dan identitas etnis. Pandangan Barat tentang *sinicization* di Tiongkok cukup kompleks dan beragam, sering dilihat melalui lensa geopolitik, hak asasi manusia, dan pelestarian budaya.

1. Konteks historis

Pandangan barat mengakui bahwa *sinicization* telah menjadi proses yang berkelanjutan sepanjang sejarah Tiongkok. Mereka menyadari bahwa Tiongkok, sebagai negara peradaban, telah lama memberikan pengaruh budaya terhadap wilayah-wilayah tetangganya. Namun, interpretasi modern tentang *sinicization* sering dianggap lebih disengaja dan dikendalikan oleh negara, terutama di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (Katzenstein and Hau, 2012).

2. Hak Asasi Manusia

Situasi di Xinjiang telah menjadi titik fokus utama dalam diskusi tentang *sinicization*. Laporan-laporan tentang "kamp pendidikan ulang" dan penindasan terhadap etnis Uyghur telah memicu reaksi keras internasional dan dianggap oleh banyak pihak di Barat sebagai bentuk genosida budaya. *Sinicisasi* Tibet juga menjadi perhatian besar di Barat. Kebijakan-kebijakan yang mendorong migrasi etnis Han ke wilayah tersebut dan pembatasan praktik budaya Tibet dilihat sebagai upaya untuk melemahkan identitas Tibet yang unik. Ada kekhawatiran serius di Barat mengenai dampak *sinicization* terhadap hak asasi manusia. Laporan-laporan tentang penahanan massal, pengawasan ketat, dan pembatasan kebebasan beragama, terutama di wilayah Xinjiang dan Tibet, telah memicu kecaman internasional (UN Human Rights Report).

3. Keragaman Budaya

Banyak pengamat Barat melihat *sinicization* sebagai ancaman terhadap keragaman budaya. Mereka berpendapat bahwa proses ini dapat mengakibatkan hilangnya bahasa, tradisi, dan praktik keagamaan yang unik dari kelompok-kelompok minoritas (Tibet Rights Collective).

4. Teknologi dan Pengawasan

Sistem pengawasan berteknologi tinggi, termasuk pengenalan wajah dan AI di Xinjiang. Penggunaan teknologi canggih sebagai upaya pemerintah Tiongkok untuk memantau, mengawasi, mengontrol, dan mengendalikan populasi minoritas Uyghur melalui kombinasi kamp pendidikan

ulang, pengawasan video yang meluas, dan sistem kepolisian multi-tingkat. Kelompok Barat menanggapi hal ini sebagai pelanggaran privasi dan kebebasan individu yang serius (Kam and Clarke 2021).

5. Pendidikan dan Perdebatan Akademis

Kebijakan pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Mandarin dan ideologi partai dilihat oleh Barat sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya minoritas dan menanamkan kesetiaan kepada negara (Dwyer).

6. Perspektif Ekonomi

Sinicization telah membawa pembangunan ekonomi ke daerah-daerah minoritas, tetapi mereka mempertanyakan apakah manfaat ini sebanding dengan biaya budaya dan sosial. Sementara pemerintah Tiongkok sering membenarkan kebijakan-kebijakannya atas dasar stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, perspektif barat cenderung skeptis terhadap argumen ini, melihatnya sebagai dalih untuk kontrol yang lebih ketat (Gallelli, 2022).

7. Respons Kebijakan

Perspektif Barat tentang *sinicization* di Tiongkok sebagian besar kritis, melihatnya sebagai tantangan terhadap keragaman budaya, hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Namun, ada juga pengakuan akan kompleksitas masalah ini, mengakui konteks historis dan tantangan dalam memerintah negara multi-etnis (Cheng, 2021).

Pandangan Islam Terhadap Sinicization

Sinicization telah menjadi kebijakan penting pemerintah Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap komunitas Muslim di negara tersebut, terutama etnis Uyghur di wilayah Xinjiang. Dari perspektif Islam, proses *sinicization* ini menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan terkait kebebasan beragama dan pelestarian identitas budaya Muslim. Berbeda dari pendekatan normatif yang lazim, penelitian ini tidak menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai pembenaran moral semata, melainkan sebagai objek wacana keagamaan yang berfungsi membangun makna tentang keadilan dan kebebasan beragama. Dalam teks-teks pandangan Islam, Muslim Uyghur dikonstruksikan sebagai bagian dari umat yang tertindas, sementara negara diposisikan sebagai aktor zalim yang melanggar prinsip keadilan. Dalam perspektif van Dijk, wacana Islam ini mencerminkan kognisi sosial umat, yang dibangun melalui nilai ukhuwah, keadilan, dan hak beragama. Ayat Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber legitimasi diskursif yang menantang dominasi negara dan menolak narasi ekstremisme. Dengan demikian, teks-teks keislaman dipahami bukan sebagai kebenaran teologis yang absolut, tetapi sebagai praktik wacana yang membangun resistensi simbolik. Pendekatan ini menjaga konsistensi epistemologis antara analisis sosial kritis dan studi keagamaan, karena Islam diperlakukan sebagai sistem wacana, bukan doktrin normatif semata.

Konstruksi “Ekstremisme” sebagai Strategi Diskursif Negara

Salah satu temuan utama dalam analisis ini adalah bagaimana istilah “ekstremisme” berfungsi sebagai konsep kunci dalam wacana negara. Ekstremisme tidak didefinisikan secara teologis atau konseptual yang jelas, tetapi digunakan secara elastis untuk merujuk pada praktik keagamaan, simbol Islam, dan identitas budaya Uyghur. Dalam perspektif CDA van Dijk, istilah ini berfungsi sebagai kategori ideologis, bukan deskripsi netral. Melalui konstruksi ini, negara tidak hanya mengkriminalisasi tindakan tertentu, tetapi juga mendeligitimasi identitas keagamaan. Muslim Uyghur direpresentasikan bukan sebagai subjek warga negara yang memiliki hak beragama, melainkan sebagai potensi ancaman keamanan. Hal ini menunjukkan bagaimana wacana keamanan digunakan untuk membenarkan dominasi struktural negara terhadap kelompok minoritas.

Pertarungan Wacana: China, Barat, dan Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa isu *Sinicization of Islam* merupakan arena pertarungan tiga wacana utama. Pemerintah China memproduksi wacana stabilitas dan keamanan, Barat memproduksi wacana HAM dan demokrasi, sementara Islam memproduksi wacana keadilan dan kebebasan beragama. Ketiganya beroperasi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, tetapi saling



berhadapan dalam ruang diskursif global. Dalam kerangka van Dijk, pertarungan ini tidak hanya terjadi pada level teks, tetapi juga pada level kognisi sosial dan konteks geopolitik global. Oleh karena itu, *Sinicization of Islam* harus dipahami sebagai fenomena diskursif yang merefleksikan dominasi, resistensi, dan ideologi dalam tatanan dunia kontemporer.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap kompleksitas wacana Sinicization of Islam yang diproduksi oleh pemerintah China terhadap Muslim Uyghur melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, dengan menelaah secara mendalam dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro wacana negara secara sistematis membentuk narasi hegemonik yang melegitimasi tindakan asimilasi budaya dan kontrol sosial sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Pilihan bahasa yang strategis, seperti penggunaan istilah “ekstremisme,” memperlihatkan bagaimana bahasa berfungsi bukan sebagai alat komunikasi netral, melainkan instrumen kekuasaan yang mendiskreditkan identitas keagamaan dan membenarkan praktik represif negara.

Pada tingkat kognisi sosial, terdapat perbedaan mendasar dalam cara aktor sosial utama—pemerintah China, Barat, dan umat Islam—memandang dan menafsirkan fenomena ini. Pemerintah China menginternalisasi wacana nasionalisme dan keamanan sebagai justifikasi dominasi, sementara Barat mengedepankan nilai-nilai HAM dan liberalisme yang sekaligus mengandung kepentingan geopolitik. Pandangan Islam, sebagai kognisi sosial ketiga, mengandung prinsip keadilan dan kebebasan beragama yang membangun resistensi simbolik terhadap narasi dominasi tersebut. Pertarungan kognisi ini menjadi arena perebutan makna yang memperlihatkan bagaimana ideologi dan nilai-nilai sosial membentuk pemaknaan yang berbeda terhadap kebijakan yang sama.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, wacana Sinicization of Islam merupakan refleksi dari relasi kekuasaan global dan lokal yang sarat dengan konflik kepentingan politik, identitas budaya, dan hak asasi manusia. Kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pengendalian minoritas, sementara kritik Barat tidak luput dari kerangka geopolitik dan strategi hegemoni budaya. Di sisi lain, pandangan Islam memberikan dimensi normatif yang menantang dominasi negara sekaligus menawarkan perspektif keadilan sosial yang penting dalam diskursus global. Dengan demikian, Sinicization of Islam harus dipahami sebagai fenomena wacana yang dinamis dan dialektis, di mana ketiga unsur dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial saling berinteraksi untuk mereproduksi dan menantang struktur kekuasaan yang ada.

Penelitian ini menegaskan bahwa analisis kritis terhadap wacana tidak hanya membuka tabir ideologi tersembunyi dalam bahasa dan narasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana wacana menjadi alat dominasi sekaligus arena perlawanan. Dengan memahami interaksi ketiga dimensi ini, kita dapat menangkap secara lebih utuh dan kritis kompleksitas fenomena Sinicization of Islam, serta implikasinya bagi kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan dinamika kekuasaan global kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: Not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831–838. <https://doi.org/10.17265/1548-6591/2014.10.003>
- Cheng, F. (2021). The evolution of “sinicisation.” *Journal of the Royal Asiatic Society*, 31(2), 321–342. <https://doi.org/10.1017/S1356186320000681>
- China responsible for “serious human rights violations” in Xinjiang province: UN human rights report. (n.d.). United Nations in Denmark. Retrieved November 13, 2025, from <https://un.dk/china-responsible-for-serious-human-rights-violations-in-xinjiang-province-un-human-rights-report/>
- Dijk, T. A. van. (2015). *Principles of critical discourse analysis*. <https://discourses.org/wp-content/uploads/2022/07/Teun-A.-van-Dijk-2015-Critical-discourse-Analysis.pdf>
- Dwyer, A. M. (n.d.). *The Xinjiang conflict: Uyghur identity, language policy, and political discourse*. Retrieved November 13, 2025.
- Gallelli, B. (2022). China’s official narratives on Xinjiang: Interethnic mingling, economic prosperity and religious terrorism. *Asia Maior*, 16(Special Issue 2). <https://www.asiamaior.org/the-journal/16-asia->



- maior-special-issue-2-2022/chinas-official-narratives-on-xinjiang-interethnic-mingling-economic-prosperity-and-religious-terrorism.html
- Gilreath, G. S. (2008). *Government and religion in China*. https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1184
- Kam, S., & Clarke, M. (2021). Securitization, surveillance and “de-extremization” in Xinjiang. *International Affairs*, 97(3), 625–642. <https://doi.org/10.1093/ia/iab038>
- Katzenstein, P. J., & Hau, C. S. (2012). *Sinicization and the rise of China: Civilizational processes beyond East and West*. Routledge.
- Kuan, H.-C. (2012). *Religion and politics in China*. Pontifical Academy of Social Sciences. <https://www.pass.va/content/dam/scienze-sociali/pdf/acta17/acta17-kuan.pdf>
- Liwan, W. (2020). Transition and institutionalization. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 6(4), 371–478. <https://doi.org/10.1142/S2377740020500219>
- Miao, Y. (2020). Romanticising the past: Core socialist values and the China dream as legitimisation strategy. *Journal of Current Chinese Affairs*, 49(2), 162–184. <https://doi.org/10.1177/1868102620981963>
- Sehrawat, A. (2024). The new regulations for religions in Xinjiang: Part of a wider campaign against religion. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/the-new-regulations-for-religions-in-xinjiang-part-of-a-wider-campaign-against-religion/>
- Stone, H., & Sidel, J. L. (2003). Sensory evaluation: Descriptive analysis. In *Encyclopedia of food sciences and nutrition* (pp. 5152–5161). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-227055-X/01065-8>
- Theaker, H. (2024). China’s sinicisation campaign puts Islamic expression on the line. *European Asia Briefing Centre*. <https://doi.org/10.59425/EABC.1715637600>
- Tibet Rights Collective. (n.d.). China’s sinicization programme erasing the country’s fragile cultural diversity. Retrieved November 13, 2025, from <https://www.tibetrightrightscollective.in/op-eds-commentaries/chinas-sinicization-programme-erasing-the-countrys-fragile-cultural-diversity>